

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Cilacap

Provinsi Jawa Tengah mempunyai luas wilayah yang cukup esensial di Pulau Jawa. Berdasarkan data dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, bahwa luas Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah sebesar 3.254.412 ha atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa. Secara geologi, Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi yang berada pada jalur pegunungan muda (*ring of fire*) dunia yang membuat provinsi ini memiliki sumber daya alam yang kaya. Kondisi ini memberikan dampak serta peluang besar dalam sektor pertanian dengan tanah vulkanik yang subur mendukung hasil produksi pertanian yang melimpah bagi provinsi Jawa Tengah. Selain itu, lokasi strategis yang dimiliki provinsi Jawa Tengah memudahkan akses dalam distribusi barang maupun transportasi antar wilayah karena letaknya yang dekat dengan pelabuhan utama menjadikan wilayah yang substantif untuk meningkatkan perekonomian salah satunya dalam bidang industri.

Pada wilayah provinsi Jawa Tengah ini, memiliki kabupaten yang berpengaruh dalam peningkatan perekonomian nasional salah satunya adalah Kabupaten Cilacap yang merupakan kabupaten terluas yang berada di Jawa Tengah, dengan luas wilayah sebesar 2.124,50 km², Cilacap menyumbang sekitar 6,50% dari total luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Jika dilihat dari kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Cilacap yaitu Kabupaten Banyumas yang berbatasan di sebelah utara Cilacap hanya memiliki luas sekitar 1.335,50 km²

yang mana luas Kabupaten Banyumas jauh lebih kecil daripada Kabupaten Cilacap. Sedangkan Kabupaten Brebes yang berada di sebelah barat Kabupaten Cilacap memiliki luas sekitar 1.902,40 km². Melihat dari luas wilayah, Kabupaten Cilacap jauh lebih unggul daripada kabupaten lain yang berada di Provinsi Jawa Tengah (Badan Pusat Statistik, 2021). Luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Cilacap menjadi sumber potensi ekonomi yang bervariasi, terutama di bidang sektor industri dan energi. Kabupaten Cilacap memiliki kilang minyak Pertamina RU IV yang merupakan kilang terbesar di Indonesia, yang mana memiliki kapasitas produksi mencapai 348.000 barel per hari sehingga menjadikannya pusat krusial dalam pengolahan serta pendistribusian bahan bakar minyak dan produk turunan yang lain.

Hal ini, tentu saja menjadi salah satu penggerak utama perekonomian di Cilacap memiliki kontribusi besar terhadap kebutuhan energi nasional. Selain kilang minyak, terdapat beberapa industri yang berkaitan dengan produksi semen. PT Holcim yang sudah berubah nama menjadi PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) menjadi penggerak utama produksi semen di Indonesia. Keberadaan industri semen ini mampu memproduksi jutaan ton semen setiap tahunnya yang dimanfaatkan sebagai proyek infrastruktur dalam negeri, seperti pembangunan jalan tol dan infrastruktur yang lain untuk menunjang peningkatan kualitas publik. Di samping itu, keberadaan Pelabuhan Tanjung Intan yang memiliki skala internasional menjadikan Cilacap sebagai simpul logistik yang sangat strategis bagi sektor energi dan industri karena mampu meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dalam beberapa waktu terakhir, Cilacap dikenal sebagai pionir dalam pengelolaan

lingkungan melalui pengembangan teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF) yang merupakan suatu inovasi dalam pengolahan sampah yang dihasilkan berdasarkan kemitraan pemerintah dan swasta dalam mendukung program energi bersih dan pembangunan yang berkelanjutan.

2.1.1 Letak Geografis dan Administratif Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap terletak di sisi Selatan Pulau Jawa dengan karakteristik yang beragam. Perbatasan Kabupaten Cilacap mencakup Samudera Hindia di sebelah Selatan, Kabupaten Banyumas di sebelah Utara, Kabupaten Ciamis di sebelah Barat, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara disebalah Timur. Kabupaten Cilacap ini terletak pada ketinggian 6-198 meter di atas permukaan laut jika dilihat berdasarkan topografi. Keberagaman kondisi topografi Kabupaten Cilacap meliputi dataran rendah di wilayah pesisir, dan kawasan pegunungan. Bagian barat laut Kabupaten Cilacap merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian diatas 100 meter diatas permukaan laut. dengan titik tertinggi mencapai 1.210 meter yang terletak di gunung Subang Kecamatan Dayeuluhur (Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap, 2016). Kondisi ini memiliki dampak terhadap curah hujan yang tinggi sepanjang tahun 2021 di bulan November tercatat 613,00 mm (Kabupaten Cilacap Dalam Angka, 2021). Oleh karena itu, Kabupaten Cilacap menghasilkan produksi dari bidang pertanian dan kehutanan sebagai pemanfaatan lahan yang subur sehingga menjadi komoditas yang substantif di Kabupaten Cilacap. Hasil produksi pertanian seperti padi, jagung, dan kedelai sedangkan kehutanan Cilacap memiliki produksi bahan mentah kayu seperti kayu jati dan mahoni untuk bahan baku industri mebel maupun konstruksi. Tidak hanya dari

sektor darat, Kabupaten Cilacap juga memiliki potensi besar di wilayah pesisir, salah satunya Pulau Nusakambangan yang terletak di bagian Selatan wilayah daerah Kabupaten Cilacap, yang membatasi Segara Anakan dan Samudera Hindia. Sejak zaman pemerintahan Hindia-Belanda pada 1908, mengesahkan bahwa pulau ini menjadi penjara hukuman khusus (*bijzondere straf gevangenis*) selain itu, pulau ini adalah cagar alam berdasarkan *Gouvernement Besluit*. Nusakambangan ini terbentang dari Barat ke Timur sepanjang ± 30 kilometer yang mana memberikan keuntungan besar bagi penduduk yang tinggal di daerah pesisir pantai karena mereka dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang dihasilkan terutama dalam bidang perikanan dan pariwisata.

Kabupaten Cilacap juga memiliki dua sungai yang besar yang pertama, pada wilayah sungai Citanduy yang mana wilayah sungai ini dijadikan sebagai sungai lintas provinsi dengan panjang ± 175 km sungai ini sebagai pembatas antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Daerah sungai ini sebagian berada di Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Majalengka dan Kuningan (Nasrullah, 2011). Kedua, sungai Serayu aliran sungai ini juga menyusuri kabupaten lain yang ada di Jawa Tengah yaitu Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga dan Banyumas. Luas sungai Serayu ini sekitar 2.685,77 km² dengan panjang utama sungai 180 km dan merupakan sungai strategis nasional.

Berdasarkan administratif Kabupaten Cilacap terbagi menjadi 24 Kecamatan yang memiliki 269 desa dan 15 Kelurahan yang mana setiap kecamatan memiliki peran penting dalam pengembangan serta pengelolaan sumber daya yang terdapat dalam wilayah masing-masing guna meningkatkan perekonomian daerah.

Gambar 2.1

Peta Kabupaten Cilacap



(Sumber: Pengadilan Agama Cilacap, 2019)

Ditinjau dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap wilayah yang paling luas di Kabupaten Cilacap adalah Kecamatan Wanareja yang memiliki jarak kurang lebih 86 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Cilacap luasnya mencapai 195,92 km² atau 8,29% dari total luas wilayah Kabupaten Cilacap. Kecamatan ini terdiri dari 16 desa, dengan 109 jumlah dusun. Kecamatan Wanareja memiliki dataran rendah dan dataran tinggi yang menguntungkan karena terdapat banyak potensi besar dalam pengembangan wilayah. Lalu diikuti oleh Kecamatan Dayeuluhur dengan luas mencapai 191,73 km² yang mana sama terletak dibagian barat laut Kabupaten Cilacap. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil terdapat di Cilacap Selatan yang hanya memiliki luas sebesar 8,04 km² atau 1,26% dari luas Kabupaten Cilacap. Kecamatan Cilacap Selatan hanya memiliki 5 kelurahan namun dengan begitu Cilacap Selatan memiliki peran penting terhadap pemerintahan dan

pusat ekonomi karena merupakan bagian dari pusat administratif dan pemerintahan Kabupaten Cilacap.

2.1.2 Kondisi Demografi

Kondisi demografi mempunyai peranan penting dalam kemajuan suatu daerah khususnya dalam menentukan kebijakan pembangunan serta pelayanan publik. Laju pertumbuhan penduduk sangat penting untuk diketahui karena dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kabupaten Cilacap memiliki keragaman yang tinggi dalam hal komposisi penduduk hal ini terjadi lantaran wilayah yang sangat luas berbatasan langsung dengan wilayah Jawa Barat memberikan keberagaman suku yang ada di Kabupaten Cilacap. Suku yang terdapat di Kabupaten Cilacap adalah suku Jawa dan Sunda. Cilacap adalah salah satu pusat industri di Jawa Tengah. Sejak berdirinya kilang minyak Pertamina pada tahun 1967, Kabupaten Cilacap terus mengalami peningkatan pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kabupaten Cilacap ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai kegiatan industri dan jasa berskala nasional, serta berpotensi menjadi hubungan utama kegiatan ekspor-impor atau pintu masuk ke luar negeri, dan kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat transportasi berskala nasional. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Cilacap termasuk dalam kategori pengembangan fungsi revitalisasi dan percepatan kota-kota pusat pertumbuhan nasional termasuk pengembangan di sektor energi dan lingkungan.

Tabel 2.1**Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Cilacap, 2021**

No.	Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, 2020-2021
1.	Dayeuluhur	49.021	-0.00
2.	Wanareja	106.166	0.01
3.	Majenang	141.190	0.01
4.	Cimanggu	103.282	0.01
5.	Karang Pucung	79.669	0.01
6.	Cipari	66.964	0.01
7.	Sidareja	62.538	0.01
8.	Kedungreja	89.068	0.01
9.	Patimuan	49.852	0.01
10.	Gandrungmangu	110.291	0.01
11.	Bantarsari	75.525	0.01
12.	Kawunganten	85.330	0.01
13.	Kampung Laut	15.724	0.01
14.	Jeruklegi	78.071	0.02
15.	Kesugihan	135.150	0.01
16.	Adipala	95.382	0.01
17.	Maos	46.471	0.01
18.	Sampang	43.846	0.01
19.	Kroya	115.682	0.01
20.	Binangun	69.752	0.02
21.	Nusawungu	87.130	0.02
22.	Cilacap Selatan	83.825	-0.00
23.	Cilacap Tengah	90.413	0.01
24.	Cilacap Utara	83.482	0.01
Cilacap		1.963.824	0.01

(Sumber: Kabupaten Cilacap dalam Angka, 2022)

Ditinjau dari tabel diatas, jumlah penduduk tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap pada tahun 2020 hingga 2022 kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar berada di wilayah Kecamatan Majenang yaitu mencapai 141.190 jiwa, dengan laju pertumbuhan 0.01% per tahun, disusul dengan Kecamatan Kesugihan pertumbuhan penduduk mencapai 135.150 jiwa dengan pertumbuhan penduduk 0.01% serta

Kroya dengan 115.682 jiwa dengan pertumbuhan penduduk yang sama. Sebagian besar dari kecamatan mengalami laju pertumbuhan yang sangat rendah sebesar 0,01% sementara untuk kecamatan Jeruklegi, Binangun dan Nusawungu dengan laju pertumbuhan penduduk sedikit lebih tinggi, sebesar 0,02% per tahun. hal ini menunjukkan adanya stabilitas populasi, namun tidak ada pertumbuhan yang signifikan. Sedangkan jumlah penduduk terendah dapat dilihat yaitu Kampung Laut dengan total 15.724 jiwa menunjukkan laju pertumbuhan penduduk yang rendah dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 0,01% per tahun, serta laju pertumbuhan negatif terdapat di Kecamatan Dayeuhluhur dan Cilacap Selatan menunjukkan pertumbuhan penduduk yang stabil dengan angka -0,00% yang menandakan tidak adanya perubahan dalam jumlah penduduk selama tahun ini. Hal ini dapat dipengaruhi oleh komposisi usia penduduk yang didominasi oleh usia non produktif sehingga rendahnya angka kelahiran. Usia produktif sangat mempengaruhi peran penting dalam bidang perekonomian dan pengembangan sosial.

Merujuk dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam sensus penduduk hasil proyeksi pada tahun 2020-2023 bahwa Kabupaten Cilacap memiliki total 1.988.622 penduduk, dengan 1.002.672 laki-laki dan 963.858 perempuan. Sejak dari 2020 hingga 2021, populasi kabupaten Cilacap mencapai angka pertumbuhan penduduk sebesar 0,01% dengan rasio jenis kelamin 102. Di tahun 2022 kepadatan penduduk di Kabupaten Cilacap memiliki total 930 jiwa/km². Banyaknya kecamatan yang ada di wilayah ini membuat kepadatan yang bervariasi. Secara keseluruhan kecamatan di wilayah barat Kabupaten Cilacap cenderung memiliki populasi yang lebih kecil dibandingkan dengan kecamatan di wilayah timur dan sekitar pusat Kota Cilacap.

Kepadatan pertumbuhan tertinggi terjadi di Kecamatan Cilacap Selatan total mencapai 9.214 jiwa/km² dan kepadatan terendah terjadi di Kecamatan Kampung Laut total mencapai 109 jiwa/km², diikuti dengan Kecamatan Dayeuhluhur total mencapai 265 jiwa/km².

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cilacap 2021

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	70.518	67.249	137.767
5-9	75.136	71.246	146.382
10-14	77.146	72.562	149.708
15-19	77.192	71.842	149.034
20-24	81.483	75.156	156.639
25-29	80.219	74.526	154.745
30-34	79.690	75.904	155.594
35-39	74.559	73.902	148.461
40-44	68.130	71.000	139.130
45-49	66.870	71.122	137.992
50-54	61.198	64.662	125.860
55-59	55.512	57.370	112.882
60-64	44.327	45.575	89.902
65-69	35.703	35.736	71.439
70-74	22.769	22.903	45.672
75+	19.920	22.697	42.617
Cilacap	990.372	973.452	1.963.824

(Sumber: Kabupaten Cilacap dalam Angka, 2022)

Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk mayoritas adalah penduduk usia produktif (15-64 tahun) dimana kelompok usia 20-24 tahun merupakan yang terbesar dengan 156.639 jiwa. Adanya mayoritas dari usia produktif menjadikan hal dasar untuk menentukan kebijakan angkatan kerja sebagai peningkatan perekonomian daerah. Melihat hasil Sakernas tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk Kabupaten Cilacap di tahun 2020 mencapai sebesar 67,79 persen

sedangkan di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 62,91 persen. Kondisi ini tentu perlu ditangani dengan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif.

2.1.3 Pengelolaan Sampah di Kabupaten Cilacap

Luasnya wilayah Kabupaten Cilacap menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan sampah lingkungan yang cukup kompleks dengan berbagai faktor. Pertama, belum meratanya distribusi pelayanan pengelolaan sampah meliputi area perkotaan, pedesaan dan pesisir. Kedua, banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan akibat adanya perkembangan populasi penduduk serta kegiatan industri. Munculnya jumlah penduduk yang pesat dan aktivitas manusia yang insentif menjadi masalah utama yaitu pengelolaan sampah. Selain itu, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Cilacap hanya sejumlah empat (4) TPA yaitu berada di Kecamatan Tritih Lor, Sidareja, Binangun dan Majenang. TPA tersebut belum mampu menampung sampah yang sangat banyak yang berada di Wilayah Kabupaten Cilacap. Awal dimanfaatkan pada tahun 1995 TPA yang mampu untuk menampung jumlah sampah dan memiliki lahan yang cukup luas adalah TPA Tritih Lor dengan luas lahan sekitar 6,3 hektar. Namun kondisi TPA diperkirakan pada tahun 2018 akan penuh dengan menyisakan lahan aktif sebesar 1,4 hektar yang mana belum cukup efektif dalam menampung seluruh sampah yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap yang setiap hari mengalami kenaikan jumlah timbunan sampah.

Jumlah sampah Kabupaten Cilacap dalam sehari mampu menghasilkan 955 ton yang meliputi sampah organik dan anorganik. Jika sampah-sampah ini tidak dikelola dengan baik maka dapat menyebabkan polusi tanah dan air serta menyebabkan berbagai penyakit bagi penduduk lokal.

Tabel 2.1

Jumlah Volume Sampah Per Hari Kabupaten Cilacap 2018-2022

Tahun	Potensi Volume Sampah (m3)	Pengurangan Volume Sampah (m3)	Penanganan Volume Sampah (m3)	Pengelolaan Sampah	
				Volume (m3)	%
2018	5 151,30	643,77	3 180,71	3 824,48	74,24
2019	5 405,68	695,05	3 410,87	4 105,92	75,96
2020	5 416,81	706,49	3 477,11	4 183,60	77,23
2021	5 427,76	739,03	3 559,80	4 298,83	78,55
2022	5 693,64	771,26	3 706,69	4 477,95	78,65

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, 2022)

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa potensi volume sampah di Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, potensi volume sampah tercatat sebesar 5.151,30 m³ dan terus meningkat mencapai 5. 693,64 m³ pada tahun 2022. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan produksi sampah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk serta aktivitas ekonomi dan industri yang berkembang di wilayah tersebut. Upaya pengurangan volume sampah juga mengalami peningkatan selama periode tersebut. Pada tahun 2018, volume sampah yang berhasil dikurangi sebesar 643,77 m³, sementara pada tahun 2022 angka ini menjadi naik 771,26 m³. kenaikan ini mengindikasi adanya peningkatan kesadaran dan efektivitas program-program pengurangan sampah yang diterapkan. Selain pengurangan, penanganan volume sampah juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, volume sampah yang berhasil ditangani mencapai 3.180,71 m³, sedangkan pada tahun 2022 angkanya meningkat kembali menjadi 3.706,69 m³. Hal ini mencerminkan peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di Kabupaten Cilacap, baik dari segi pengumpulan, transportasi maupun pengolahan sampah di fasilitas pengelolaan sampah yang ada.

Secara keseluruhan, jumlah volume sampah yang dikelola juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2018, volume sampah dikelola mencapai 3.824,48 m³ dengan tingkat pengelolaan sebesar 74,24 persen. Angka ini terus meningkat hingga tahun 2022, Di mana volume sampah yang dikelola mencapai 4.477,95 m³ dengan tingkat pengelolaan sampah sebesar 78,65 persen. Peningkatan presentase pengelolaan sampah yang diterapkan oleh pemerintah daerah, baik dari segi infrastruktur, kebijakan, maupun keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan limbah. Salah satu cara dari pemerintah Kabupaten Cilacap untuk menyelesaikan persoalan sampah yaitu bekerja sama dengan PT SBI dengan menggunakan teknologi RDF (*Refuse Derived Fuel*) yang berada di Tritih Lor Kabupaten Cilacap. Adanya bentuk kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam mengurangi timbulan sampah setiap tahunnya. Metode RDF ini tidak hanya dapat mengurangi timbulan sampah yang ada namun mengolah limbah menjadi bahan bakar alternatif. Kemitraan ini sebagai simbol persatuan antara sektor publik dan swasta dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang mampu dalam mengatasi masalah lingkungan di tingkat lokal maupun nasional.

2.2 Gambaran Umum PT Solusi Bangun Indonesia (SBI)

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) merupakan salah satu perusahaan terbesar dalam industri semen di Indonesia dan berpusat di Jakarta. Total kapasitas produksi tahunan termasuk operasional pabrik mencapai 14, 86 juta ton semen. PT Semen Indonesia (Persero) memiliki anak perusahaan yang menjalankan dua tambang agregat terbesar di Indonesia serta pusat jaringan *batching plan* untuk beton, yaitu PT Solusi Bangun Beton. Perusahaan memiliki dan mengelola sebagian

besar saham perusahaan sebesar (83,52%). Sejak tahun 1971, Perusahaan telah menjalankan bisnis secara komersial mendistribusikan produknya baik nasional maupun internasional. Selain berfokus pada produksi semen, perusahaan ini juga meningkatkan berbagai produk layanan yang mampu mendorong pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia. Dengan fasilitas yang dimiliki PT SBI memiliki kapasitas besar dibidang produksi yang mana memungkinkan PT SBI dalam pemenuhan kebutuhan pasar yang terus meningkat tidak hanya di dalam negeri namun juga di ekspor diluar negeri. Kemandirian dan kemampuan yang dimiliki perusahaan menjadikan PT SBI memainkan peranan penting dalam industri semen nasional. Selain itu, perusahaan sangat mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dalam kegiatan operasionalnya. PT SBI telah mencapai keberhasilan dalam mengurangi konsumsi energi dan emisi gas karbon dalam industri yang mana merupakan salah satu komitmen perusahaan dengan membantu pemerintah dan tertuliskan di dalam Peraturan Presiden RI No. 61 tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) serta mengurangi emisi CO₂ bagi industri semen di Indonesia yang tertuliskan di dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 12/M-IND/PER/1/2012 tahun 2012 tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengurangan Emisi CO₂ Industri Semen Indonesia. Inisiatif perusahaan untuk mengurangi emisi adalah dengan menggunakan energi terbarukan. Salah satu inovasinya adalah teknologi RDF yang menggunakan limbah dari sampah sebagai sumber energi alternatif selama produksi semen. Dalam pelaksanaannya, PT SBI telah menjalankan bersama pemerintah di Kabupaten Cilacap sebagai bentuk kolaborasi dalam pengelolaan sampah. Kolaborasi dengan berbagai pihak yang dilakukan oleh PT SBI sebagai

sinergitas dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dimana PT SBI ikut mendukung program pemerintah dalam menciptakan infrastruktur yang aman bagi lingkungan.

2.2.1 Sejarah dan Profil PT SBI

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) merupakan perusahaan publik yang menjadi bagian dari Semen Indonesia Group. PT Solusi Bangun Indonesia bergerak di bidang usaha yang terintegrasi, meliputi produksi semen, beton siap pakai dan agregat. Perusahaan ini mengoperasikan empat pabrik utama yang tersebar di Narogong (Jawa Barat), Cilacap (Jawa Tengah), Tuban (Jawa Timur) dan Lhoknga (Aceh). Saat ini, PT Solusi Bangun Indonesia memiliki jaringan distribusi bahan bangunan yang luas, mencakup distributor khusus, toko bangunan, serta berbagai solusi konstruksi lainnya yang memberikan nilai tambah. Sebelumnya PT Solusi Bangun Indonesia dikenal sebagai Holcim Indonesia, yang merupakan anak Perusahaan dari PT Semen Industri Bangunan (SIIB), bagian dari BUMN yang menjadi produsen semen terbesar di Indonesia. PT Solusi Bangun Indonesia memfokuskan distribusi produknya untuk pasar dalam negeri, terutama di Pulau Jawa. Pabrik Cilacap yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda, Karangtalun, Cilacap, dipilih karena berbagai keunggulan strategis, seperti kedekatan dengan sumber bahan baku, akses transportasi yang baik, serta tenaga kerja yang tersedia. ketersediaan air dari PDAM dan lokasi di kawasan industri juga menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan lokasi ini. Pada tahun 2019, PT, Semen Indonesia (Persero) Tbk melalui anak perusahaannya, SIIB, secara resmi menyelesaikan akuisisi saham sebesar 80,6% saham Lafarge Holcim Group di PT

Holcim Indonesia Tbk. Akuisisi ini tidak hanya menghilangkan hak penggunaan serta pengelolaan atas merek dagang holcim akan tetapi, menyebabkan perubahan nama Holcim Indonesia menjadi PT Solusi Bangun Indonesia, yang telah disahkan di dalam akta notaris No. 11 tahun 2019 yakni mengubah nama dua anak perusahaan lainnya, yaitu PT Holcim Beton dan PT Lafrage Cement Indoneisa, yang kini masing-masing dikenal sebagai PT Solusi Bangun Beton dan PT Solusi Bangun Andalas.

2.2.2 Visi dan Misi PT SBI

Visi

“Menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional”

Misi

1. Berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam setiap inisiatif bisnis, komitmen penuh terhadap kepuasan pelanggan, menjamin mutu kualitas pelayanan dengan memperhatikan manfaat yang diberikan serta solusi nyata sesuai dengan kebutuhan pasar.
2. Menerapkan standar terbaik untuk menjamin mutu kualitas, dalam segala proses produksi dan layanan yang diberikan agar memenuhi harapan pelanggan.
3. Fokus menciptakan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan, mewujudkan kepuasan yang berorientasi pada pelanggan selaku prioritas utama dalam segala

program berkelanjutan yang diberikan kepada masyarakat lingkungan sekitar.

4. Memberikan nilai tambah terbaik untuk seluruh pemangku kepentingan, berfokus dalam peningkatan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terkait baik pelanggan, mitra bisnis, maupun pemangku kepentingan sosial.
5. Menjadikan sumber daya manusia menjadi pusat pengembangan perusahaan, menciptakan sumber daya yang berkualitas dengan berbagai program pelatihan yang berkelanjutan memberikan penciptaan lapangan kerja yang mendorong kooperasi inovasi berkelanjutan.

2.2.3 Makna Visi Misi PT SBI

Dengan melihat visi dan misi ini, PT SBI menunjukkan komitmen perusahaan untuk menjadi pemimpin pasar dengan standar kualitas tinggi yang berorientasi pada pelanggan, bertanggung jawab terhadap masalah lingkungan dan sosial yang berkelanjutan. PT SBI bersama-sama memberikan kontribusinya dalam upaya mengatasi permasalahan lingkungan dalam hal ini masalah persampahan yang terjadi di Kabupaten Cilacap. Solusi yang ditawarkan oleh PT SBI yaitu dengan mengolah sampah menjadi sebuah inovasi yaitu *Refuse Derived Fuel* (RDF) dimana sampah dilakukan proses pengeringan sehingga menghasilkan energi alternatif yang mampu dimanfaatkan PT SBI sebagai pengganti batu bara dalam produksi bisnisnya yaitu semen. Dengan mengusung keunggulannya mengubah sampah menjadi energi alternatif, PT SBI tidak hanya sekadar

menjalankan bisnis, tetapi juga mengukuhkan komitmennya terhadap keberlanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan. Langkah ini bukan hanya soal inovasi teknologi, melainkan refleksi dari fokus perusahaan untuk menghadirkan dampak yang nyata bagi lingkungan. Oleh sebabnya, inovasi RDF yang diciptakan oleh PT SBI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prioritas bisnis mereka.

2.3 Kemitraan Pemkab Cilacap dan PT SBI

2.3.1 Sejarah Kemitraan Pemkab Cilacap dan PT SBI

Kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta atau *public private partnership* merupakan konsep yang efektif dalam mengatasi berbagai persoalan publik (April & dkk, 2024). Pendekatan ini mampu memadukan sumber daya dari kedua sektor untuk memberikan solusi yang lebih terintegrasi. Berdasarkan dalam penelitian Muhammad April mengutip penelitian dari Wang et al. (2018), yang menjelaskan bahwa kemitraan antara sektor publik dan swasta (PPP) telah menjadi konsep yang populer secara global, karena kemampuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan. Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, seperti yang diatur dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUUPB). Selain itu, pentingnya *Good Enviromental Governance* (GEG) semakin terasa dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat menjadi elemen krusial, karena melibatkan masyarakat aktif, serta kesadaran lingkungan. Namun, kesadaran akan terbentuk jika didukung dengan pelayanan publik yang responsif dari pihak pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah memiliki program terkait pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di Jawa Tengah ini dilakukan melalui strategi program JAKSTRADA (Kebijakan Strategi Daerah)

untuk pengurangan sampah. Program ini menjadi pedoman bagi kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Berdasarkan pada Pasal 4 dari Pergub Jateng Nomor 11 Tahun 2019, terkait target pengurangan sampah sebesar 30% yang diharapkan tercapai di tahun 2025. Salah satu metode jangka panjang yang berkelanjutan dan dipertimbangkan Pemerintah Kabupaten Cilacap adalah mengolah sampah perkotaan menjadi RDF (*Refuse Derived Fuel*) yang merupakan hasil dari pemisahan sampah berdasarkan kandungan kalorinya yang tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif di pabrik semen.

Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berbasis inovasi RDF di Kabupaten Cilacap berawal pada tahun 2014, ketika Pemerintah Kabupaten Cilacap bekerja sama menjalin mitra dengan PT Holcim Indonesia yang kemudian beralih ke PT Solusi Bangun Indonesia (SBI). Dalam tahap awal PT SBI menyumbangkan 50% untuk bahan modal pabrik lalu sisanya yang 50% adalah sumbangan dari pihak DANIDA (*Danish International Development Agency*) yang mana skema dari program *Enviromental Support Programme Phase 3* yang menyediakan sisa pendanaan 50 persen. Melalui pemerintah pusat aset yang diperoleh DANIDA akan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap agar dapat digunakan untuk menjalankan fasilitas RDF. Pada tahapan proses seperti, belanja operasional dan pemeliharaan pabrik RDF ini akan dibiayai dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Cilacap. Selanjutnya teknologi RDF akan dijalankan dan dipelihara oleh entitas ekonomi PT SBI yang mana RDF dimanfaatkan untuk menggantikan batu bara beralih ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Pada dasarnya adanya fasilitas ini merupakan kerja sama dari berbagai pihak yang

ikut menunjang dalam pengoperasian RDF di Kabupaten Cilacap terdapat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan NGO DANIDA ESP3 Denmark serta sebagai *off taker* adalah PT SBI. Pihak Pemerintah Pusat lewat Kementerian PUPR berperan sebagai penyedia bangunan utama, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membantu dalam infrastruktur pendukung, DANIDA ESP3 Denmark membantu dalam bentuk pemberian hibah mesin pengolahan RDF yang telah dibeli untuk diberikan ke Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten Cilacap berkewajiban dalam menyediakan lahan serta biaya operasional pengangkutan sampah untuk RDF serta melakukan pemeliharaan. Sementara itu, PT SBI sebagai mitra kerja sama akan menyediakan tenaga kerja, menjalankan operasional, serta menangani pengangkutan hasil RDF. PT SBI berencana memanfaatkan RDF sebagai bahan pengganti batu bara di kiln pabrik semen serta berkomitmen untuk terlibat dalam proyek pengelolaan sampah. Penciptaan adanya inovasi RDF ini, sebagai harapan agar menghasilkan efisiensi dalam pengelolaan sampah, sekaligus mendukung pengurangan emisi gas dan pengembangan energi dari sampah. Pemerintah Kabupaten Cilacap Bersama PT Holcim saat itu membuat kesepakatan yang tertera dalam nota Kesepakatan Bersama Nomor: 658.1/89/25/Tahun 2014 dan Nomor: 0558^a /MoU/LCA LCA/HIL/XII/2014 terkait Pengelolaan Sampah di Desa Tritih Lor Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Lalu dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama yang tertera dalam addendum antara Pemerintah Kabupaten Cilacap dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Nomor: 660.1/1351/24 dan Nomor: 100.3.7.1/PKS/03/2023 terkait Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

2.3.2 Peran Pemerintah Kabupaten Cilacap

Peraturan Pemerintah Nomer 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah mengatur strategi pengelolaan sampah, termasuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Salah satu upaya dalam pengelolaan sampah adalah dengan menyelenggarakan tempat pengolahan sampah yang mengadopsi prinsip *Refuse, Reduce, Recycle* (3R), serta memanfaatkan teknologi modern. Implementasi ini bertujuan dalam menekan jumlah sampah yang berakhir di Tempat Pemuangan Akhir (TPA). Dalam pengaplikasiannya di Kabupaten Cilacap, memiliki pendekatan yang berbeda berpedoman pada kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah berbasis teknologi RDF (*Refuse Derived Fuel*) yang diatur melalui Peraturan Bupati Nomor. 233 Tahun 2018. Peraturan tersebut memberikan dasar hukum yang jelas bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam mengimplementasikan program Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga berbasis RDF (*Refuse Derived Fuel*) di Kabupaten Cilacap. Peraturan Bupati ini, mengatur tentang kewenangan dalam menetapkan tujuan dan sasaran pengurangan, pengelolaan, serta pengolahan sampah, khususnya di bagian Ketiga Pasal 6, tujuan utamanya adalah agar sampah yang masuk ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dapat dikelola secara langsung, sehingga mencegah penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir. Melalui teknologi RDF, sampah rumah tangga diolah menjadi bahan bakar pengganti batu bara atau bahan bakar fosil. Teknologi RDF tidak hanya mampu mengolah sampah menjadi sumber energi yang bermanfaat, tetapi juga membantu menjalankan kebijakan pengelolaan sampah secara lebih efektif dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewajiban dalam

penyediaan lahan serta akses jalan yang mendukung infrastruktur pengelolaan sampah berbasis RDF. Tindakan ini, merupakan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Hal ini, sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku sebagaimana tercantum pada pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Nomor. 233 Tahun 2018, yang mana membangun koordinasi dalam penerapan program pengolahan sampah RDF perlu dilakukan dengan melibatkan lintas sektor antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Cilacap, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Adanya kombinasi kebijakan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap melihat pentingnya pengelolaan sampah yang perlu dilakukan secara berkelanjutan tidak semata-mata hanya dilakukan penampungan di TPA melainkan, memproses sampah agar memiliki nilai tambah melalui teknologi yang mampu mengolah sampah di Kabupaten Cilacap.

2.3.3 Peran PT SBI

PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) berkomitmen pada prinsip tata Kelola yang baik, *Good Corporate Governance* (GCG) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Terutama dalam aspek berkelanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Hal ini, mencerminkan dedikasi perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas industri dengan kelestarian lingkungan. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai sistem yang mampu menjunjung besar hak serta tanggung jawab oleh seluruh struktur internal serta pemangku kepentingan sehingga siap dalam mendorong perkembangan industri

yang berkelanjutan serta berjangka panjang. Peran lain perusahaan sebagai *Corporate social Responsibility* (CSR) yaitu dengan pengurangan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan. *Corporate social Responsibility* (CSR) dikutip dari jurnal (Yanto Ramli & dkk, 2022) diterapkan untuk mendorong kesadaran lingkungan akan dampak iklim, kerusakan lingkungan akibat limbah, cara pengurangan dengan menciptakan inovasi teknologi yang berkelanjutan serta pengurangan polusi. Tujuan dari CSR sendiri adalah melakukan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta dapat mempengaruhi kualitas hidup para karyawan dan kelompok masyarakat sekitar. PT SBI memiliki inisiatif keberlanjutan untuk menghadapi tantangan, dengan berfokus pada tiga aspek utama yaitu aspek ekonomi, aspek lingkungan dan aspek sosial.

a) Aspek Ekonomi

PT SBI berkomitmen dalam mengatasi permasalahan urbanisasi dan lingkungan hidup dengan menciptakan barang dan menawarkan jasa reka baru. Konsep ini menganut pada konsep ekonomi sirkular dimana konsep ini memberikan sistem ekonomi yang berkelanjutan (Anas, 2022)

Ekonomi sirkular bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan konsumsi dan produksi yang lebih bertanggung jawab di tingkat nasional atau daerah, dalam upaya mendukung keberlanjutan jangka panjang (Anas dalam Kristanto & Nadapdap, 2021). Konsep ekonomi sirkular ini tentu bukan hanya

pendekatan ekonomi semata, tetapi menciptakan langkah yang strategis agar mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mengelola konsumsi dan produksi secara bertanggung jawab di tingkat nasional ataupun daerah, ekonomi sirkular memungkinkan suatu wilayah untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki serta memanfaatkan sumber daya yang baik agar setiap permasalahan yang ada dapat teratasi. Hal ini sejalan dengan praktik yang diterapkan oleh PT SBI, mengelola sampah menjadi sebuah inovasi RDF. Realisasi ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi sirkular dengan pemanfaatan 1.600.932 juta ton limbah dan sampah. Inisiatif ini menunjukkan peranan penting PT SBI dalam mengubah sampah menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berhasil menciptakan pemanfaatan ulang sumber daya sesuai dengan konsep yang ditekankan yaitu ekonomi sirkular. Keberhasilan yang dicapai PT SBI dengan terciptanya fasilitas RDF yang telah berjalan di Kabupaten Cilacap dengan memproses 160 ton sampah per hari. Dalam operasionalnya PT SBI tidak hanya bekerja sama dengan Kabupaten Cilacap namun bersama PT Bali CMPP, Pemerintah DKI Jakarta, Temanggung dan Sleman dalam pemanfaatan sampah menjadi RDF. Selain target pencapaian PT SBI juga memiliki target di tahun 2025 dengan membuat proyek sampah perkotaan *Municipal Solid Waste* (MSW) menjadi RDF, yang terdiri dari limbah padat sampah rumah tangga, komersial (toko, restoran, hotel dll) dan institusional (sekolah, rumah sakit, kantor kantor dll) untuk mengurangi volume sampah dan

menghasilkan energi bagi industri PT SBI. Program ini terealisasi sebagai bagian dari *green economy* yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, efisiensi sumber daya dan pengurangan emisi karbon. Pada dasarnya proyek ini dirancang agar menciptakan solusi yang memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat, sekaligus sebagai peningkatan ekonomi lokal yang dihasilkan dari sampah sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

b) Aspek Lingkungan

Lingkungan merupakan tempat kehidupan manusia dan menjadi tempat menampung limbah hasil dari kegiatan manusia (Sembel, 2015 dalam Cahya, 2022). Pada alamiahnya lingkungan mampu menetralkan diri dari semula jika limbah mampu di tampung dengan daya dukung lingkungan itu sendiri. Lingkungan disandingkan dengan keaktifanya dalam menerima limbah baik dari rumah tangga maupun industri yang mana dapat menyebabkan berbagai perubahan terjadi dari keadaan kualitas lingkungan baik pencemaran air, tanah, udara (Cahya, 2022). Pelestarian usaha untuk meminimalkan dampak lingkungan akibat kegiatan perusahaan, PT SBI menempatkan prioritas besar pada pengurangan emisi CO₂, proteksi yang dilakukan terhadap keanekaragaman hayati, penggunaan sumber daya terbarukan, dan konservasi sumber daya udara melalui penerapan teknologi dan sistem manufaktur yang efektif. Pencapaian yang telah dilakukan yaitu dengan

penggunaan sebanyak 1.171.580 m³ air hasil dari penampungan air hujan melalui Pembaruan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati atau *Biodiversity Action Plan* (BAP) Nusakambangan yang telah berhasil mencapai nilai 100%. Keberhasilan program yang telah diimplementasikan tidak hanya mencerminkan pemenuhan target secara kuantitatif melainkan melihat komitmen yang dilakukan perusahaan guna melihat sejauh mana perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya dan mencapai indikator serta memenuhi target BAP dengan sempurna. Tidak hanya itu, PT SBI juga membangun kerja sama dengan Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) serta target ditahun 2025 yaitu membangun jalinan kerja sama bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau bersama dengan universitas terkemuka dalam program konservasi. Upaya dalam menjalin kerja sama merupakan cara perusahaan dalam memperkuat kredibilitasnya dalam aspek lingkungan dan juga aspek sosial. Dalam bidang konservasi dukungan dari ahli memang sangat diperlukan untuk melakukan berbagai penelitian maupun inovasi yang diterapkan pada saat proses manajemen lingkungan. Hasil kerja sama dapat menjadi pandangan perusahaan untuk belajar dan secara mandiri mampu menjalankan program agar berdampak positif baik untuk masyarakat maupun pemerintah.

c) Aspek Sosial

Sebagai perusahaan yang kini berstatus BUMN, PT Solusi Bangun Indonesia melaksanakan program-programnya yang selaras

dengan prioritas pemerintah daerah, termasuk upaya dalam pengentasan kemiskinan. Salah satu caranya adalah melalui program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). PT SBI berdedikasi memberikan kontribusi positif yang berarti kepada masyarakat sebagai landasan strategis dalam keberlanjutan kegiatan perusahaan. Perusahaan tidak bergerak sendiri, untuk popularitasnya perusahaan membutuhkan masyarakat sebagai eksternalnya (Widiarti & dkk). Di dalam Peraturan Pemerintah Nomer 47 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan terbatas disebutkan program CSR perusahaan adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi terhadap masyarakat, baik dalam bentuk dukungan yayasan, organisasi maupun individu. Dengan adanya kontribusi ini perusahaan menunjukkan kepekaan terhadap lingkungan sekitar, membantu memenuhi kebutuhan sosial dan memperkuat hubungan dengan masyarakat agar tercipta reputasi baik. Usaha dedikasi dilakukan oleh PT SBI sebagai tanggung sosial perusahaan dalam memberdayakan masyarakat, PT SBI menjalankan tanggung jawab dengan lima pilar CSR dan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan program pembangunan yang berkelanjutan. Pertama SBI Cedas, yang mencakup berbagai upaya dalam pembangunan infrastruktur pendidikan. Dalam kerangka pilar ini PT SBI menawarkan program beasiswa untuk pendidikan vokasi yang ditujukan bagi para teknisi. Di samping itu, PT SBI juga menyediakan beasiswa untuk pendidikan dasar selama 9 tahun yang telah dilakukan di Tuban dan Jakarta program kejar paket, program pembrantasan buta huruf, sekolah alam serta membantu

dalam pembangunan perpustakaan. Kedua bidang kesehatan, yaitu dengan adanya pembangunan fasilitas kesehatan seperti posyandu, lalu adanya program pengobatan gratis, hingga pembangunan rumah yang memenuhi standar kelayakan huni. Ketiga SBI Mandiri, yaitu membentuk sebuah program yang mencakup pemberdayaan koperasi, ekonomi mikro, masyarakat nelayan dari tahap pengolahan makanan sampai pengembangan kuliner. Keempat SBI Lestari, yang mana meliputi berbagai program yang terkait dengan lingkungan seperti kesadaran lingkungan, bank sampah dan pembuatan *eco park*. Kelima SBI Peduli, SBI mendorong dalam pengembangan kegiatan sosial budaya termasuk dalam dukungan kehidupan umat beragama, tanggap darurat serta bencana lingkungan. Komitmen yang tampak dalam program lima pilar CSR, menggambarkan perusahaan bahwa keberlanjutan reputasi jangka panjang perusahaan akan lebih bermakna ketika perusahaan mampu menyelaraskan prioritasnya dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan kepada pemerintah daerah. Aspek pendidikan dan kesehatan, PT SBI tampaknya berupaya dalam memutus siklus kemiskinan dengan mendukung akses pendidikan dan upaya peningkatan dalam layanan kesehatan dasar. Selain itu aspek lingkungan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kelestarian alam. Melalui program yang telah dibentuk seperti bank sampah dan *eco park* bertujuan untuk mengedukasi kepada masyarakat luas mengenai pengelolaan sampah dan menjaga kelestarian alam bersama.